



L K I P

INSPEKTORAT WILAYAH I TAHUN ANGGARAN 2019



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

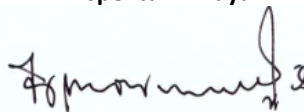
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Badan Pusat Statistik Tahun 2019. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah I kepada publik dan pemangku kepentingan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit pengawasan intern di Lingkungan BPS, kinerja Inspektorat Wilayah I harus dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPS yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah I diantaranya meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Wilayah I selama tahun 2019 secara terperinci dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I. Selain itu, semoga laporan kinerja ini dapat berguna untuk evaluasi dan demi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah I pada khususnya.

Jakarta, 10 Februari 2020

Inspektur Wilayah I



Yeane Irmaningrum

NIP. 196107041986012001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ikhtisar Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah I	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	7
Bab II Perencanaan Kinerja	8
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2015-2019	8
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I 2019	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I 2019	13
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018	22
3.3 Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2015-2019	28
3.4 Prestasi tahun 2019.....	29
3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	29
3.6 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama 2019.....	30
Bab IV Penutup	31
4.1 Tinjauan Umum	31
4.2 Tindak Lanjut	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2015-2019	10
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	11
Tabel 3	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2019	13
Tabel 4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I Tahun 2018-2019.....	23
Tabel 5	Capaian Kinerja 2018 terhadap Target Renstra 2019	28
Tabel 6	Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 per Indikator Kinerja.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah I.....	6
Gambar 2	Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah I.....	7
Gambar 3	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2015-2019	9
Gambar 4	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS	32
Lampiran 2	Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah 1 Tahun 2015-2019	33
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	34
Lampiran 4	Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2019 per Triwulan	35
Lampiran 5	Daftar Nama Satker yang Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM (Berdasar SK Kepala BPS RI) Tahun 2019	37
Lampiran 6	Daftar Nama Satker yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kategori “Baik” di bawah Pembinaan Inspektorat Wilayah I Tahun 2019.....	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Wilayah I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019.

Visi Inspektorat Wilayah I 2015-2019 adalah **“Inspektorat Wilayah I yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Wilayah I mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu peningkatan birokrasi yang akuntabel. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Inspektorat Wilayah I memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang sama dengan Inspektorat Utama. Sedangkan indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Wilayah I merupakan turunan dari IKU Inspektorat Utama BPS.

Inspektorat Wilayah I memiliki dua komponen dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut yang terdiri dari pembinaan pengawasan kinerja dan keuangan serta pelaksanaan audit internal. Adapun anggaran pada Inspektorat Wilayah I sebesar Rp3.022.289.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.936.786.274,- (97,17 %).

Pencapaian atas sasaran strategis, IKU dan IKS tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari 1 (satu) sasaran strategis dan 8 (delapan) IKU yang menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Wilayah I tahun 2019, sebanyak 6 (enam) IKU terealisasi sesuai target. Sementara 2 (dua) IKU yang tidak tercapai pencapaiannya yaitu “Jumlah unit kerja yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran kurang dari 3%” dan “Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan”.

Capaian IKU Inspektorat Wilayah I Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	56	55	98,21%
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	22	25	113,64%
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	20	21	105%
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	5	10	120%
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	4	4	100%
	Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	100%	100%	100%
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	20	16	80%
Rata-Rata Capaian Kinerja				102,11%

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2019 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 102,11 persen. Tujuan/sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2019 dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2019 dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I di masa mendatang.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS, tugas Inspektorat Wilayah I adalah melakukan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah I memiliki tugas melakukan pengawasan fungsional yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2019 serta diselaraskan dengan Renstra 2015-2019.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah I terus berupaya meningkatkan kompetensi auditornya serta memperluas cakupan kegiatan pengawasannya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri dari Audit Pengelolaan Keuangan Negara, Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Kinerja); Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berupa Audit Investigasi; Probity Audit Pengadaan Peralatan IT SP2020; Reviu Laporan Keuangan; Reviu Laporan Kinerja; Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa (PB/J); Evaluasi Implementasi SAKIP; Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern (SPI On-Line) dan Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, *Liasion Officer* (LO) BPK/BPKP. Selain itu Inspektorat Wilayah I juga memiliki tugas antara lain; Unit Pemberantasan Pungli Sapu Bersih Pungutan Liar (UPP Saber Pungli), evaluasi BMN, evaluasi penilaian prestasi kerja (DP3) Kepala BPS Provinsi, evaluasi disiplin PNS, pembinaan JFA (penilaian DUPAK), penanganan benturan kepentingan (RB), penyelenggaraan PMPRB, dan pengendalian gratifikasi (RB).

Pada awal tahun 2019, Inspektorat Wilayah I menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I tahun 2019. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dalam bentuk matrik rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah I kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2019.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Wilayah I dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Utama dan Kepala BPS. Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur dengan jabatan Eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB IX Bagian kedua Pasal 383 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat serta STIS.

Fungsi Inspektorat Wilayah I sebagaimana tercantum pada BAB IX Bagian kedua dalam pasal 384 yaitu:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I

1.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Wilayah I

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dari tahun ke tahun Inspektorat Wilayah I berusaha meningkatkan kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Meskipun terdapat penambahan pegawai sebanyak 2 orang di tahun 2019, namun adanya mutasi pegawai keluar menyebabkan jumlah pegawai di Inspektorat Wilayah I di tahun 2019 tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 23 orang.

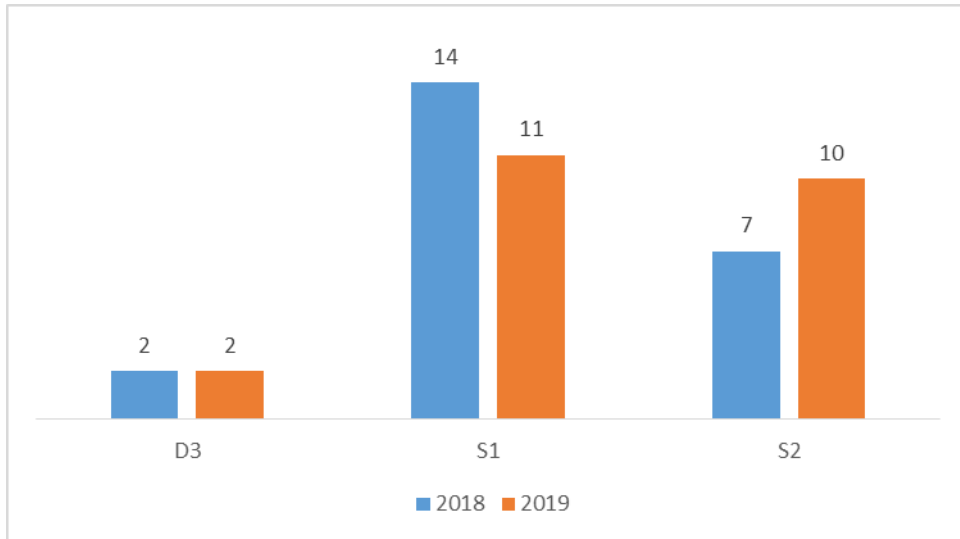
Sementara itu, di awal tahun 2019 dilakukan rotasi pegawai antar Inspektorat Wilayah di lingkungan Inspektorat Utama sebagai upaya memberikan penyegaran dan pemerataan kompetensi. Hal ini mengakibatkan perubahan komposisi pegawai di Inspektorat Wilayah I baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionalnya. Berikut ini adalah rincian SDM di Inspektorat Wilayah I.

a. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Jumlah pegawai Inspektorat Wilayah I dengan tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 2 orang, sementara pendidikan Diploma IV/S1 sebanyak 10 orang. Untuk pegawai yang memiliki pendidikan Strata II di tahun 2019 ini meningkat dari 7 orang menjadi 10 orang, sehingga

dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Wilayah I sudah sangat baik.

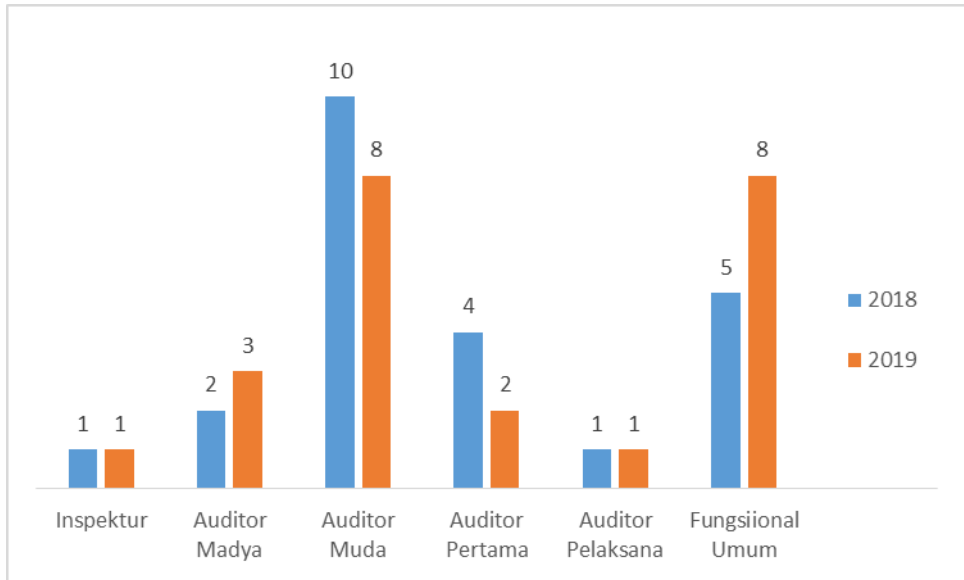
Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah.



Gambar 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah I

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Di lingkungan Inspektorat Wilayah I terdapat 14 pegawai yang telah menjabat sebagai Fungsional Tertentu atau Fungsional Auditor, 8 pegawai sebagai Fungsional Umum, dan sisanya 1 pegawai sebagai Pejabat Struktural Inspektur. Untuk jabatan Fungsional Auditor, dibagi kedalam beberapa jenjang jabatan yaitu auditor pelaksana lanjutan, auditor pertama, auditor muda dan auditor madya. Untuk diketahui bahwa seluruh pegawai Inspektorat Wilayah I sudah memiliki sertifikat pembentukan auditor sesuai tingkat pendidikannya. Hal ini sebagai prasyarat untuk masuk ke dalam tim pemeriksa Inspektorat Wilayah I meskipun belum menjabat fungsional auditor. Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah I menurut jenjang Jabatan Fungsional Auditor dirinci pada grafik di bawah ini:



Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Wilayah I

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah I, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Utama; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2019
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2019, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2015-2019 dan Realisasi Anggaran tahun 2019
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2015-2019

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah I sebagai bagian dari Inspektorat Utama BPS telah menetapkan pedoman kerja seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama 2015-2019. Didalam Renstra menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok selama periode lima tahunan. Pada tahun 2019 ini merupakan periode terakhir dalam melaksanakan Renstra 2015-2019.

Visi Inspektorat Utama adalah “Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS”. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa auditor Inspektorat Utama, baik secara individu maupun tim, harus memiliki sikap profesional, berintegritas dan amanah dalam menjalankan perannya sebagai APIP, serta mampu menjadi penjamin kualitas seluruh kegiatan BPS, khususnya penyelenggaraan statistik yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik;*
“Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui pengawasan yang terprogram, terarah dan telah berbasis risiko (*risk based audit*), pengidentifikasian penyimpangan, penyampaian temuan dan rekomendasi kepada auditan, dan penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata pemerintahan yang baik”.
2. *Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas;*
“Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional dan berintegritas diharapkan terus meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) auditor, baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis substantif, seminar, dan workshop di bidang

pengawasan, serta peningkatan integritas pengawas dengan penerapan *core value* BPS dan kode etik auditor”.

3. *Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel;*

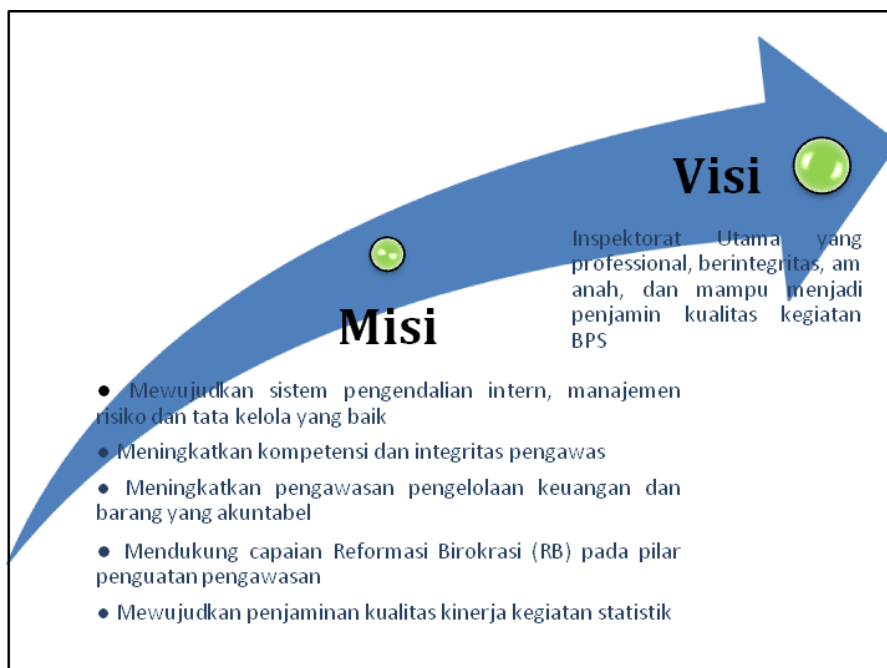
“Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab”.

4. *Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan; dan*

“Inspektorat Utama berperan dalam mewujudkan capaian Reformasi Birokrasi, serta mendukung peningkatan penguatan pengawasan melalui pembangunan zona integritas (ZI)”.

5. *Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik.*

“Penjaminan kualitas yang dilakukan Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan statistik telah sesuai dengan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan”.



Gambar 3. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2015-2019

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah I merupakan bagian dari Inspektorat Utama. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I Tahun 2015-2019 melekat pada Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019. Sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I sama dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Utama.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2019

Pada awal tahun, ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019. Target PK Tahun 2019 dan target PK Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2018 dan 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2018	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	100
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satker	52	56
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	12	22
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	9	20
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	1	5
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	1	4
	Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	17	20

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat Wilayah I berusaha mempertahankan target kinerja pada level terbaik, yaitu indikator dengan nilai persentase ditetapkan target 100%, serta pada indikator kinerja ditetapkan target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagai komitmen untuk mencapai target Renstra 2019 yang sekaligus target kinerja jangka menengah. Keberhasilan pencapaian target-target tersebut menjadi tolak ukur kinerja Inspektorat Wilayah I dan memberi kontribusi signifikan pada kinerja Inspektorat Utama.

Realisasi dari target perjanjian kinerja dimonitoring setiap triwulanan yang dituangkan dalam form rencana aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan capaian kinerja triwulanan. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah I kepada Inspektur Utama atas penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah I.

BAB 3

AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2019

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2019. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Reviu Terakhir). Ulasan capaian kinerja Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Inspektorat Wilayah I mempunyai satu tujuan dan satu sasaran strategis. Tujuannya yaitu peningkatan birokrasi yang akuntabel. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah:

Tabel 3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Sasaran: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I				
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satker	56	55	98,21
Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	22	25	113,64
Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	20	21	105
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK	Satker	5	10	120

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(berdasarkan SK Kepala BPS RI)				
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	4	4	100
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100	100
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	20	16	80
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				102,11

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran (IKS), terdapat 6 (enam) indikator yang realisasinya memenuhi target yang ditetapkan dan terdapat 2 (dua) indikator yang tidak memenuhi target.

Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I

IKS 1 : Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti

Target IKS pertama merupakan tindak lanjut dari satker yang diperiksa tim auditor Inspektorat Wilayah I.

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	100	100

Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi Inspektorat atas temuan audit tahun 2019 telah selesai ditindaklanjuti oleh satker. Namun, untuk mencapai realisasi tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dhadapi. Adapun kendala tersebut sebagai berikut.

Kendala:

1. Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh auditor dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan (14 hari kerja setelah evaluasi akhir);
2. Kurangnya pemahaman data dukung atas tindak lanjut temuan hasil audit;
3. Tindaklanjut melibatkan pihak lain, misalnya melibatkan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam SK Sewa Rumah Dinas ataupun teguran tertulis atas kelalaian satker melaksanakan tanggungjawabnya;
4. Belum ada SOP yang mengatur mengenai lamanya waktu penyelesaian penyusunan laporan tindak lanjut.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Inspektorat Wilayah I melakukan beberapa upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2019 dapat tercapai. Berikut beberapa solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I.

Solusi:

1. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tindaklanjut kepada auditor (*monitoring*);
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan auditor dan/atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyelesaian tindaklanjut rekomendasi;
3. Membuat tim untuk merancang aplikasi monitoring online;
4. Membuat SOP yang mengatur mengenai lamanya waktu penyelesaian tindak lanjut;
5. Bila diperlukan, akan dilakukan teguran kepada satker yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Utama.

IKS 1.2 : Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3% (tiga) persen

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satker	56	55	98,21

Pada tahun 2019, target jumlah satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA adalah 56 satker sementara realisasinya sebesar 55 satker. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja hanya sebesar 98,21 persen. Berdasarkan hasil capaian kinerja bisa dilihat bahwa pencapaian belum mencapai target. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Adapun kendala tersebut sebagai berikut:

Kendala:

1. Perbedaan persepsi dalam mengartikan peraturan antara auditor dan auditan;
2. Perbandingan antara sumber daya (jumlah auditor dan anggaran) dengan jumlah satker tidak seimbang yang mengakibatkan pembinaan pada satker kurang maksimal;
3. Informasi temuan yang terjadi pada satker tersebut tidak terkomunikasi dengan baik;
4. Belum mempunyai mekanisme konsultasi yang terdokumentasi dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi/pembinaan koordinasi/pembinaan dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota;
2. Menambah jumlah auditor dan meningkatkan kualitas auditor yang ada dengan berbagai diklat dan PKS agar maksimal dalam melaksanakan pembinaan pada satker tersebut;
3. Ketika temuan berulang pada satker yang sama, maka rekomendasi yang diberikan lebih tegas;
4. Membuat aplikasi *help desk* dalam rangka pelayanan konsultasi yang lebih baik.

IKS 1.3: Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	22	25	113,64

Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator jumlah satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 113,64 persen. Jumlah satker yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP ialah sebanyak 25 satker. Laporan keuangan satker tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Wilayah I pada awal tahun 2019 sehingga dapat diyakini secara terbatas bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan SAP. Untuk mencapai kinerja tersebut, ditemukan kendala dalam prosesnya antara lain sebagai berikut:

Kendala:

1. Diterapkannya akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan, dimana hal tersebut baru dimulai pada Tahun 2016;
2. Sering adanya pergantian personil penyusun laporan keuangan, operator SAIBA, operator SIMAK dan persediaan;
3. Selain pada BPS Provinsi, reviu atas Laporan Keuangan hanya dilakukan pada satu kabupaten/kota sampel.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut:

Solusi:

1. Meningkatkan pemahaman satker mengenai SAP khususnya penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan;
2. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Utama secara umum (termasuk Inspektorat Wilayah I) dengan Bagian Akuntansi Biro Keuangan untuk membina satker-satker agar menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP;
3. Melakukan pembinaan secara simultan kepada satker mengenai penyusunan laporan keuangan.

IKS 1.4: Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	20	21	105

Pada tahun 2019, target jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik ialah sebanyak 20 satker dengan realisasinya sebanyak 21 satker. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja sebesar 105 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan 34 (tiga puluh empat) satker yang telah dievaluasi (*field*), masih terdapat 13 (tiga belas) satker yang belum mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori “Baik”. Untuk mencapai kinerja tersebut, ditemukan beberapa kendala dalam prosesnya yaitu:

Kendala:

1. Kurangnya pembinaan terhadap implementasi SAKIP pada satker;
2. Selain pada BPS Provinsi, evaluasi atas implementasi SAKIP hanya dilakukan pada dua kabupaten/kota sampel;
3. Satker hanya mengikuti *template* tanpa mengerti substansi SAKIP;
4. Perbandingan antara sumber daya (jumlah auditor dan anggaran) dengan jumlah satker tidak seimbang yang mengakibatkan evaluasi dan pembinaan implementasi SAKIP tidak bisa dilakukan pada seluruh satker;
5. Kurangnya pemanfaatan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja satker;
6. Adanya kelemahan di dalam dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi :

1. Peningkatan koordinasi antara Inspektorat Utama dan Biro Bina Program;
2. Memberikan pemahaman kepada satker akan pentingnya dokumen SAKIP untuk mewujudkan pencapaian kinerja;
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap satker untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja satker;
4. Pembinaan SAKIP sampai level BPS Kab/Kota dimana audiensi pembinaan SAKIP tidak hanya difokuskan pada Kasubbag Bina Program di BPS Provinsi atau Kasubbag TU di BPS Kab/Kota namun juga meliputi Kepala Bidang dan Kepala Seksi baik di BPS Provinsi maupun BPS Kab/Kota.

IKS 1.5: Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	5	10	120

Pada tahun 2019, Inspektorat Wilayah I menargetkan jumlah satker berpredikat WBK sebanyak 5 satker. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal BPS dari hasil *desk review* (berdasarkan hasil *self assessment*), terdapat 10 satker sebagai satker WBK Tahun 2019.

Hasil review oleh Tim Penilai Nasional (TPN) menyatakan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS Kota Kendari menerima penghargaan zona integritas untuk kategori daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.

Dalam mencapai realisasi kinerja tersebut, ditemukan kendala sebagai berikut:

Kendala:

1. Kurangnya pemahaman satker tentang pentingnya dokumentasi bukti dukung WBK;
2. Hasil survei persepsi anti korupsi yang rendah;
3. Belum adanya reward bila memperoleh predikat WBK.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut.

Solusi :

1. Meningkatkan kesadaran kepada satker akan pentingnya WBK;
2. Meningkatkan pembinaan menjadi lebih intens;
3. Meningkatkan sosialisasi pengajuan WBK;
4. Membuat *reward* untuk satker yang masuk nominasi WBK.

IKS 1.6: Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Sasaran: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I				
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	4	4	100

Pada tahun 2019, Inspektorat Wilayah I menargetkan jumlah satker berpredikat WBBM sebanyak 4 satker. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal BPS, terdapat 4 satker yang diusulkan sebagai satker WBBM Tahun 2019 yaitu BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kota Bukittinggi, dan BPS Kota Madiun. Hasil review oleh Tim Penilai Nasional (TPN) menyatakan belum ada satker BPS yang menerima penghargaan zona integritas untuk kategori daerah Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

Dalam mencapai realisasi kinerja tersebut, ditemukan kendala sebagai berikut:

Kendala:

1. Hasil survei persepsi anti korupsi yang rendah;
2. Belum adanya reward bila memperoleh predikat WBBM.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja pada indikator ini ialah pendampingan/reviu terhadap satker WBBM (SK KBPS) agar berpredikat WBBM oleh TPN dan memberikan *reward* untuk satker yang mendapat predikat tersebut.

IKS 1.7 : Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Sasaran: Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I				
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100	100

Target presentase penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya untuk tahun 2019 adalah sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Evaluasi dari tercapainya indikator ini adalah respon cepat tanggap oleh Inspektorat Wilayah I atas penanganan pengaduan yang dilaporkan. Selain itu, lebih bermanfaatnya penggunaan sistem *Whistleblowing systems* (WBS) bagi pihak yang melakukan pengaduan dimana sistem ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPS bagi pegawai, masyarakat, dan organisasi/ lembaga swadaya yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS. Aplikasi WBS diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengaduan dan meningkatkan penanganan atas pengaduan tersebut. Namun, untuk mendapatkan capaian ini ditemukan kendala dalam prosesnya.

Kendala:

1. Pengirim informasi pengaduan kepada sekretariat WBS tidak dapat dihubungi kembali (nomor handphone yang digunakan tidak dapat dihubungi kembali, surat kaleng) sehingga ketika pengaduan akan di bahas sulit untuk menghubungi kembali untuk memperoleh bukti-bukti pendukung;
2. Belum terdapat jadwal rutin pembahasan laporan pengaduan;
3. Kebijakan tentang penanganan pengaduan masyarakat belum ditetapkan pada tahun 2019.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi yaitu membuat Perka tentang pengaduan Masyarakat, mengimplementasikan dan mengevaluasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

IKS 1.8 : Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Sasaran: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I				
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	20	16	80

Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan ialah sebesar 80 persen. Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan ialah sebanyak 16 auditor dari 20 yang ditargetkan. Evaluasi dari tidak tercapainya indikator ini dikarenakan terbatasnya pemanggilan diklat dari BPKP untuk auditor Inspektorat Wilayah I.

Solusi yang akan dilakukan adalah merancang keperluan diklat setiap auditor sesuai dengan kebutuhan diklat per masing-masing auditor di setiap awal tahun sehingga bisa melakukan prioritas diklat pada masing-masing auditor sesuai kebutuhannya.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Tujuan Inspektorat Wilayah I ialah Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Utama harus mencapai sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I. Dilihat dari capaian indikator, perkembangan capaian Kinerja tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I
Tahun 2018 – 2019**

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	97	97	100	100	100
Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satker	52	61	117,3	56	55	98,21
Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	12	12	100	22	25	113,64
Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	9	21	120	20	21	110
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	1	4	120	5	10	120
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	1	2	120	4	4	100
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	17	13	76,5	20	16	80
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				105,6			102,11

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata sasaran telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 102,11 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun capaian sasaran kinerja tahun 2019 sudah di atas 100 persen, namun secara rata-rata capaian kinerja sasaran mengalami penurunan sebesar 3,49 persen, dimana sebelumnya Tahun 2018 rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai sebesar 105,6 persen. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran (IKS), ada 3 (tiga) indikator yang

mengalami penurunan capaian, 3 (tiga) indikator yang mengalami peningkatan capaian, dan 2 (dua) indikator yang nilai capaiannya sama dengan tahun lalu. Adapun rincian sebagai berikut:

IKS 1 : Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti

Target IKS “tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti” diukur dengan cara jumlah tindak lanjut dari satker yang diperiksa dibagi jumlah Rekomendasi tim auditor Inspektorat Wilayah I.

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	97	97	100	100	100

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya maka capaian kinerja Tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 dimana pencapaian kinerja pada Tahun 2019 sebesar 100 persen, sedangkan pencapaian Tahun 2018 sebesar 97 persen.

IKS 1.2 : Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3% (tiga) persen

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	Satker	52	61	117,3	56	55	98,21

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian menurun dari tahun sebelumnya. Pencapaian Tahun 2019 mencapai 98,21 persen, sedangkan pada Tahun 2018 lalu, pencapaian kinerja sebesar 117,3 persen.

IKS 1.3: Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	12	12	100	22	25	113,64

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pencapaian lebih baik dari tahun 2018. Pada Tahun 2019, pencapaian kinerja sebesar 113,64 persen, sedangkan pada Tahun 2018 pencapaian kinerja sebesar 100 persen.

IKS 1.4: Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	9	21	120	20	21	105

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian menurun dari tahun sebelumnya. Pencapaian Tahun 2019 mencapai 105 persen, sedangkan pada Tahun 2018, pencapaian kinerja sebesar 120 persen.

IKS 1.5: Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	1	4	120	5	10	120

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pencapaian sama dengan tahun 2018. Pada Tahun 2019 pencapaian kinerja untuk indikator ini sebanyak 10 satker, sedangkan tahun 2018 sebanyak 4 satker.

IKS 1.6: Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	1	2	120	4	4	100

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian menurun dari tahun sebelumnya. Pencapaian Tahun 2019 mencapai 100 persen, sedangkan pada Tahun 2019, pencapaian kinerja sebesar 120 persen. Namun untuk jumlah satker yang berpredikat WBBM mengalami kenaikan.

IKS 1.7 : Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100	100	100	100	100

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pencapaian kinerja pada tahun ini sama yaitu sebesar 100 persen.

IKS 1.8: Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I							
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	17	13	76,47	20	16	80

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja naik, pada Tahun 2019 capaian kinerja sebesar 80 persen dan pada Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 76,47 persen.

3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2015-2019

**Tabel 5. Capaian Kinerja 2019 terhadap Target Renstra
Inspektorat Wilayah I Tahun 2019**

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Target 2019	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS. Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I				
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	-	100
Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satker	55	56	100
Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	25	12	113,64
Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	21	12	105
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	10	2	120
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	4	1	100
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	-	100
Jumlah satker yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	Satker	n.a.	12	n.a.
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	16	20	80
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA				102,33

Berdasarkan hasil analisis perbandingan diatas, terdapat 1 (satu) IKU dengan pencapaian pada tahun 2019 tidak optimal dan perlu mendapat perhatian agar dapat tercapai pada perencanaan tahun yang akan datang yaitu IKU "Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi

minimal lima jenis diklat bidang pengawasan” dengan target pada tahun 2019 sebanyak 20 (dua puluh) auditor, tetapi realisasi pada tahun 2019 hanya sebanyak 16 (delapan belas) auditor.

3.4 Prestasi Tahun 2019

Selama tahun 2019, Inspektorat Wilayah I belum memperoleh penghargaan baik dari internal maupun eksternal.

3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pagu yang diberikan ke Inspektorat Wilayah I untuk menjalankan fungsinya selama tahun 2019 adalah sebesar Rp3.022.289.000,- dengan realisasi mencapai 97,17 persen atau sebesar Rp2.936.786.274,-.

Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Per Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Kegiatan	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3 persen	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2.113.897.000	2.051.400.730
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Reviu Laporan Keuangan	344.900.000	341.107.198
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	307.219.000	301.340.846
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	-	-	-
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK kepala BPS RI)	-	-	-
	Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pengaduan	-	-
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	-	-	-
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Peningkatan Kompetensi Auditor (JFA, Seminar, dan Workshop)	256.273.000	242.937.500

3.6 Upaya Efisiensi Inspektorat Utama Tahun 2019

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong K/L untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Upaya efisiensi yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I adalah :

1. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2017 tentang efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Wilayah I tidak ada *self blocking*;
2. Efisiensi dalam Penugasan PKPT, antara lain:
 - a) Tidak diperkenankan pemilihan tiket pesawat kelas “Y” kecuali karena alasan keterbatasan ketersediaan tiket;
 - b) Pada beberapa tim yang personilnya sejenis, penghematan akomodasi dilakukan dengan cara menyewa satu kamar untuk berdua;
3. Efisiensi lainnya yang dilakukan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:
 - a. Efisiensi dalam pemilihan hotel untuk kegiatan konsinyasi, yaitu dengan melakukan survei dan membandingkan beberapa hotel sebelum menentukan hotel yang tepat;
 - b. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara mencetak draft LHA dan produk-produk audit lainnya yang akan dikoreksi oleh pihak terkait, menggunakan kertas bekas;
 - c. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode “hemat” atau beralih pada penggunaan mesin fotokopi yang bisa melakukan pencetakan dokumen melalui *softcopy* sehingga menghemat tinta printer;
 - d. Menghemat penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu orang saja yang bekerja hingga malam, mematikan PC, laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan.

BAB 4

PENUTUP

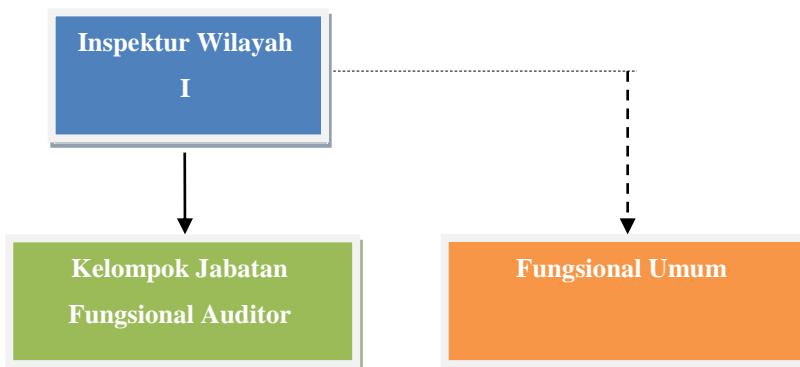
4.1. Tinjauan Umum

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2019 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 102,33 persen. Terdapat upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I, terutama pada jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang yaitu penyusunan rencana audit yang mendukung tercapainya target penilaian kinerja Inspektorat Wilayah I agar jumlah unit kerja yang diaudit sesuai target dan merancang keperluan diklat setiap auditor sesuai dengan kebutuhan diklat per masing-masing auditor di setiap awal tahun sehingga bisa melakukan prioritas diklat pada masing-masing auditor sesuai kebutuhannya.

Susunan Organisasi Inspektorat Wilayah I



Target Kinerja pada Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2015 - 2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Inspektorat Wilayah I						
	Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I	48	50	52	54	56
	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	-	-	-	-	-
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	44	46	49	52	56
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	12	12	12	12	12
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	7	8	9	10	12
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	1	1	1	1	2
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	0	0	1	1	1
	Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	-	-	-	-	-
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	12	-	-	12	12
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	5	9	13	17	20

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satker	56
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	22
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	20
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	5
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	4
	Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	Satker	n.a
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	20

Lampiran 4

Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2019 per Triwulan

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah I	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	TW I	100	100	100
			TW II	100	100	100
			TW III	100	100	100
			TW IV	100	100	100
	Jumlah Satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	Satker	TW I	14	1	7,14
			TW II	28	7	25
			TW III	42	17	40,48
			TW IV	56	55	98,21
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	TW I	22	24	109,09
			TW II	22	24	109,09
			TW III	22	25	113,64
			TW IV	22	25	113,64
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satker	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	20	21	105
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	TW I	0	0	0
			TW II	5	10	120
			TW III	5	10	120
			TW IV	5	10	120
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	TW I	0	0	0	
		TW II	4	4	100	
		TW III	4	4	100	
		TW IV	4	4	100	

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat dan organisasi/ lembaga swadaya	Persen	TW I	100	100	100
			TW II	100	100	100
			TW III	100	100	100
			TW IV	100	100	100
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	TW I	13	16	120
			TW II	17	16	94,12
			TW III	19	16	84,21
			TW IV	20	16	80

**Daftar Nama Satker Yang Mendapatkan Predikat WBK dan WBBM
(Berdasarkan SK Kepala BPS RI)
Tahun 2019**

- I. UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)**
 1. BPS PROVINSI SUMATERA BARAT
 2. BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 3. BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 4. BPS KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 5. BPS KOTA SURABAYA
 6. BPS KABUPATEN SIDOARJO
 7. BPS KOTA MALANG
 8. BPS KOTA BLITAR
 9. BPS KABUPATEN SAMPANG
 10. BPS KOTA KENDARI

- II. UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**
 1. BPS PROVINSI JAWA TIMUR
 2. BPS PROVINSI SULAWESI BARAT
 3. BPS KOTA BUKITTINGGI
 4. BPS KOTA MADIUN

**Daftar Nama Satker yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP
Kategori “Baik” di bawah Pembinaan Inspektorat Wilayah I Tahun 2019**

1.	BPS PROVINSI SULAWESI BARAT	76,02	(BB)
2.	BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA	75,39	(BB)
3.	BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN	75,13	(BB)
4.	BPS PROVINSI JAWA TIMUR	75,02	(BB)
5.	BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	73,34	(BB)
6.	BPS PROVINSI SUMATERA BARAT	73,10	(BB)
7.	BPS PROVINSI BANGKA BELITUNG	72,89	(BB)
8.	BPS PROVINSI PAPUA BARAT	71,82	(BB)
9.	BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU	71,19	(BB)
10.	BPS PROVINSI DI YOGYAKARTA	69,50	(B)
11.	BPS PROVINSI PAPUA	64,11	(B)
12.	BPS KABUPATEN AGAM	60,77	(B)
13.	BPS KABUPATEN OKI	68,42	(B)
14.	BPS KOTA PALEMBANG	67,81	(B)
15.	BPS KABUPATEN GUNUNG KIDUL	60,11	(B)
16.	BPS KOTA YOGYAKARTA	60,55	(B)
17.	BPS KOTA BANJARMASIN	65,37	(B)
18.	BPS KABUPATEN JOMBANG	61,67	(B)
19.	BPS KABUPATEN KONAWE	61,11	(B)
20.	BPS KABUPATEN BOMBANA	62,18	(B)
21.	BPS KABUPATEN MAMASA	62,79	(B)